

BAB I

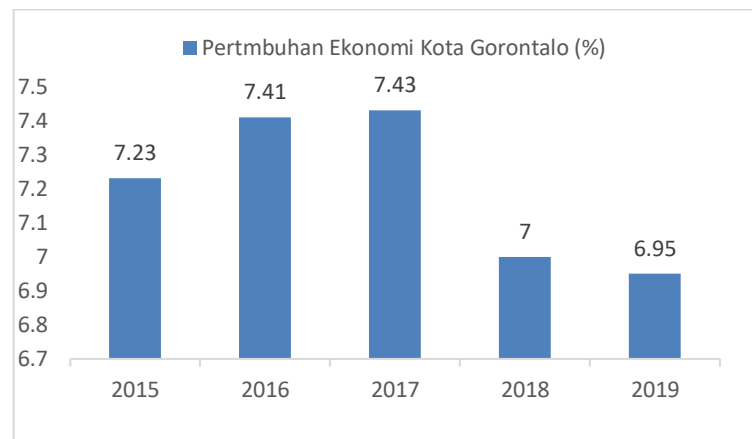
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di tingkat nasional maupun perekonomian di tingkat regional sangat mempengaruhi kinerja ataupun pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya-upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat seutuhnya dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula (Sunan & Senuk, 2015).

Setiap daerah pasti mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan daerah agar mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Suksesnya pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur untuk melihat sejauh mana perkembangan perekonomian disuatu daerah. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan adanya peningkatan dalam pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disebut juga sebagai tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal (Suci & Asmara, 2014).

Pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah. Ramadhani (2016) menyatakan bahwa sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban masyarakat. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, Kota Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari aturan yang memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatur daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah. Sebagai pengimplikasian otonomi daerah tersebut, pemerintah wajib melaksanakan pembangunan ekonomi daerah untuk menunjang ekonomi nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo ditentukan oleh perkembangan aktivitas perekonomian yang dipengaruhi pertumbuhan atau peningkatan perekonomian skala Nasional maupun daerah (Kota Gorontalo). Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo 2015-2019 (%)

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi atau fenomena naik turun. Di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7.23%. di tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 7.41%. Kemudian ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan diangka 7.43. Pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mengalami penurunan yaitu sebesar 7.00 di tahun 2018 dan 6.95 di tahun 2019.

Secara harfiah pembangunan memerlukan anggaran untuk memulai suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Anggaran yang dimaksud yaitu anggaran yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sularso, 2011).

Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan tahun anggaran selama satu tahun. Besaran penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap tahunnya dapat menjadi penentu keberhasilan suatu pembangunan daerah. Realisasi APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah, akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Larengkum et.al, 2015). Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2016).

Pemerintah daerah yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut (Pramita, 2015) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah daerah Kota Gorontalo secara geografis merupakan

wilayah pemerintahan dibawah naungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan roda pemerintahan oleh pemerintah Kota Gorontalo dilandaskan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang telah disusun tanpa ada campur tangan dari pemerintah provinsi Gorontalo. Kondisi keuangan daerah Kota Gorontalo dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data kondisi keuangan daerah yang dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kota Gorontalo pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data APBD dan Realisasi APBD Kota Gorontalo Tahun 2020

Akun	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.046.354.690.850,00	902.857.910.795,00	86,29 %
PAD	246.960.765.850,00	193.212.516.902,00	78,24 %
Daper	699.009.803.000,00	627.904.855.258,00	89,83 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	100.384.122.000,00	81.740.538.635,00	81,43 %
Belanja	1.071.083.872.225,00	902.538.226.141,00	84,26 %
Belanja Tidak Langsung	461.975.827.159,19	424.450.926.282,00	91,88 %
Belanja Langsung	609.108.045.065,81	478.087.299.859,00	78,49 %

Sumber: Portal Data Kemenkeu, 2021

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik. Bisa dilihat peritem seperti item Pendapatan dimana realisasi dari anggaran yang ada diakumulasi mencapai angka 86,29%. Pada item Pendapatan terbagi atas beberapa subitem yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp, 246.960.765.850,- dan direalisasikan sebesar 193.212.516.902, yang

kedua adalah item Dana Perimbangan yang memiliki anggaran sebesar 699.009.803.000,- dan direalisasikan sebesar 627.904.855.258,- atau sebesar 89,83%, dan yang terakhir adalah item lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki anggaran sebesar 100.384.122.000,- dan direalisasikan sebesar 81.740538.635,- atau sebesar 81,43%. Selanjutnya ada item Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara keseluruhan anggaran yang diperoleh adalah sebesar 1.071.083.872.225,- dan direalisasikan sebesar 902.538.226.141,- atau sebesar 84.26%.

Kinerja pemerintah Kota Gorontalo dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020 bisa dibilang sangat baik jika dilihat dari data yang ada. Akan tetapi untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah bukan hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan. Salah satu alat untuk meniai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2016). Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi, atau dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat (Widodo dalam Yasin, 2017). Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD antara lain; rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian belanja operasional, dan rasio keserasian belanja modal.

Kinerja pemerintah Kota Gorontalo dalam mengelola keuangan daerah yang baik nampaknya belum dapat mempengaruhi perekonomian di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan data pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo yang menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami fluktuasi bahkan di tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo berada di angka 7.43% dan kemudian turun menjadi 7% di tahun 2018 dan di 2019 kembali turun menjadi 6.95%. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah rasio efektifitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo?
3. Bagaimanakah rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui rasio efektifitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, dapat menjadi acuan pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian khususnya mengenai Kinerja Keuangan Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai Kinerja Keuangan Daerah Kota Gorontalo

b. Bagi pembaca

Menambah informasi mengenai Kinerja Keuangan Daerah Kota Gorontalo

c. Bagi Pemerintah

Sebagai Gambaran Tentang hubungan Kinerja Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Dan juga menjadi bahan acuan sebagai pengambilan keputusan.